

# Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina

Endi RUKMO

**A**WAL TAHUN 1989 bisa dianggap sebagai lembaran baru dalam usaha-usaha pencairan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (Cina). Dikatakan lembaran baru karena setelah tahun 1967 Indonesia membekukan hubungannya dengan Cina sebagai reaksi terhadap peranan Beijing yang secara politis mendukung Gerakan 30 September-PKI (G-30-S/PKI), tampak usaha-usaha yang semakin konkrit ke arah normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut. Semakin konkritnya usaha tersebut terutama dengan adanya keterlibatan langsung Presiden Soeharto dalam perundingan normalisasi.

Hal itu terjadi ketika Presiden Soeharto mengadakan lawatan ke Jepang akhir Februari 1989 untuk melayat dan menghadiri upacara pemakaman Kaisar Jepang, Hirohito, tanggal 24 Februari 1989. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Soeharto bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen, di Tokyo tanggal 23 Februari 1989, yang menu-

rut banyak pengamat merupakan pertemuan yang tidak diduga sebelumnya. Dalam pembicaraan itu, kedua pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah lanjutan ke arah normalisasi hubungan diplomatik yang selama ini masih beku.

Kesediaan Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan pihak Cina tampaknya mendapat tanggapan yang sangat positif dari pihak Cina yang selama ini memang mendesak Indonesia agar mau mencarikan kembali hubungan kedua negara. Usaha Cina tersebut tidak saja dilakukan melalui para diplomatnya, tetapi juga melalui pemimpin negara lain yang akan berkunjung ke Indonesia. Sebagai contoh, dalam kunjungannya ke Indonesia tanggal 30 April - 2 Mei 1983 Perdana Menteri Jepang waktu itu, Yasuhiro Nakasone, sempat menyampaikan pesan Pemerintah Cina mengenai keinginannya setiap saat untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.<sup>1</sup> Pada waktu itu pesan tersebut ditang-

<sup>1</sup>Lihat Endi Rukmo, "Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina," *Suara Karya*, 23 Mei 1983.

gapi oleh Presiden Soeharto dengan mengatakan bahwa masalah hubungan dengan Cina itu tergantung pada sikap negara tersebut terhadap sisa-sisa PKI dan gerilya komunis di Asia Tenggara. Ketegasan itu selalu dinyatakan Presiden Soeharto dalam menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap permintaan pihak Beijing. Yang terakhir dinyatakan pada pidatonya di depan MPR tanggal 1 Maret 1988. Dikatakannya bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina masih dikaitkan dengan ketegasan sikap Cina untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain -- khususnya Indonesia -- dengan membantu sisa-sisa kekuatan komunis di negara-negara yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa pihak Cina tampaknya bersungguh-sungguh dalam usahanya menormalisasi hubungannya dengan Indonesia? Apa sebenarnya motivasi negara itu? Apa dampaknya bila normalisasi itu terjadi? Jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat diberikan dengan mengkaji kembali perkembangan kebijakan luar negeri Cina dan perkembangan politik serta keamanan di kawasan Asia Tenggara sejak awal dasawarsa tahun 1970-an.

### **Perkembangan Politik Luar Negeri Cina di Asia Tenggara**

Pada tanggal 16 Januari 1980 Deng Xiaoping menyatakan di depan Sidang Komite Sentral Partai Komunis Cina (PKC) tentang tiga tugas utama kebijakan luar negeri Cina, yaitu: (1) menentang hegemonisme dan mendukung perdamaian dunia; (2) berusaha mempersatukan kembali Taiwan ke dalam

wilayah Cina; (3) mempercepat konstruksi sosialis dengan empat program modernisasi di bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertahanan. Tugas pokok kebijakan luar negeri itu rupanya menjadi dasar motivasi Cina dalam mengembangkan hubungannya dengan negara-negara lain.

Pernyataan Deng Xiaoping itu sebenarnya hanya merupakan penegasan kembali dari kebijakan luar negeri Cina yang telah dianutnya sejak awal tahun 1970-an. Ketika itu Cina telah secara efektif mengadakan saling pendekatan dengan Amerika Serikat dan Jepang, yang pada dasawarsa sebelumnya dianggap musuh nomor satu. Perubahan kebijakan ini kiranya tidak terlepas dari persengketaan yang semakin meningkat dengan Uni Soviet yang memuncak pada Perang Perbatasan tahun 1969.

Sementara itu di Asia Tenggara Cina mulai pula mengadakan pendekatan-pendekatan baru. Pada tahun 1971, misalnya, Cina menjalin hubungan diplomatik dengan Birma. Hubungan yang sama juga diresmikan dengan Malaysia, ketika almarhum PM Malaysia, Tun Abdul Razak berkunjung ke Cina tanggal 28 Mei - 2 Juni 1974. Setahun kemudian menyusul Filipina ketika Presiden Marcos berkunjung ke Cina tanggal 7-11 Juni 1975 dan sebulan kemudian, yaitu tepatnya tanggal 1 Juli 1975, Thailand juga meresmikan hubungannya dengan Cina. Demikian pula hubungannya dengan Singapura, meskipun secara resmi Cina belum membuka hubungan diplomatiknya, hubungan dagang dan hubungan bilateral lainnya terus meningkat. Hal tersebut diungkapkan oleh kunjungan Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam ke Beijing pada pertengahan Maret 1975 dan kunjungan PM Lee Kuan Yew tanggal 10-24 Mei 1976.

<sup>2</sup>Pidato. *Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR-RI*, 1 Maret 1988, hal. 23.

Meskipun demikian, pada awal sampai pertengahan dasawarsa 1970-an itu, Cina tetap berusaha mempertahankan hubungan antar partai. Cina tetap mendukung partai-partai komunis di Birma, Malaysia dan Thailand. Cina juga terus memancarkan siaran-siaran radio bergelombang pendek dari wilayah Yunan yang berisi hasutan-hasutan dan pernyataan-pernyataan dukungannya kepada partai-partai komunis di Asia Tenggara termasuk PKI. Politik "dua muka" Cina tersebut mencerminkan keinginannya untuk menyesuaikan diri pada situasi internasional yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik dengan Uni Soviet dan pendekatan timbal-balik dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan dukungannya kepada partai-partai komunis di negara-negara Asia Tenggara.

Namun, sejak tahun 1975 tampak terdapat beberapa perubahan penting yang dibuat oleh Cina. Sejak itu rupanya Cina tidak bersemangat lagi mendukung gerakan-gerakan komunis di negara-negara Asia Tenggara. Hal itu disebabkan, *pertama*, perubahan kepemimpinan di Cina, seperti direhabilisasinya Deng Xiaoping dan tokoh-tokoh korban Revolusi Kebudayaan, yang mengakibatkan munculnya kekuatan yang lebih menginginkan penekanan hubungan lain. *Kedua*, para pemimpin baru Cina menghendaki dipereratnya hubungan dengan negara-negara Barat terutama setelah Cina memutuskan untuk mengadakan reformasi dengan melaksanakan empat modernisasi. Itulah sebabnya Cina pada tahun 1978 mengadakan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan dengan Jepang dan pada tanggal 1 Januari 1979 Cina meresmikan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat.

Tampaknya Cina tidak lagi memandang dunia ini terbagi dalam tiga dunia yaitu: Du-

nia Kesatu terdiri dari kedua "superpower" Uni Soviet dan Amerika Serikat; Dunia Kedua terdiri dari negara-negara industri Barat; Dunia Ketiga terdiri dari negara-negara sedang berkembang termasuk Cina. Dalam pandangannya tentang pembagian dunia itu, Cina berpendapat bahwa Dunia Kedua dan Dunia Ketiga harus bersatu untuk melawan Dunia Kesatu. Tetapi sejak konfliknya dengan Uni Soviet itu, pandangan tersebut mulai ditinggalkan. Cina berusaha merangkul Amerika Serikat untuk melawan Uni Soviet. Karena adanya kepentingan strategi dan militer yang paralel itulah maka hubungan kedua negara terus meningkat.

Perubahan sikap Cina itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sendiri, terutama setelah Vietnam menjadi seterunya dan diterima sebagai anggota COMECON di dalam Sidang Dewan Politik organisasi itu di Bukares tanggal 27-29 Juni 1978. Vietnam juga telah menandatangani suatu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Uni Soviet di Moskwa tanggal 3 November 1978. Peristiwa ini terjadi hanya selisih satu bulan sebelum invasi pasukan Vietnam ke Kamboja pada bulan Desember 1978 yang akhirnya berhasil membentuk pemerintahan Heng Samrin dan mendesak kekuatan Khmer Merah yang didukung Cina. Karena kejadian itu Cina menanggapi dengan dua kebijakan, yaitu: *pertama*, dengan memberi pelajaran kepada Vietnam (menurut versi Cina) secara militer pada bulan Februari 1979, yaitu dengan mengadakan penyerbuan singkat di dalam wilayah Vietnam; dan *kedua*, dengan meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan negara-negara ASEAN dalam usahanya membendung pengaruh Soviet-Vietnam di kawasan Asia Tenggara.

Dalam usahanya meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan negara-negara ASEAN itu Deng Xiaoping mengadakan lawatan ke beberapa negara tersebut.<sup>3</sup> Dalam lawatannya itu ia menyatakan bahwa hubungan antar pemerintah perlu dibedakan antara hubungan antar pemerintah (G to G Relations) dan hubungan antar partai. Dalam hal ini dikatakannya bahwa Cina tidak akan mengijinkan hubungan antar partai itu dicampurkan dengan hubungan antar pemerintah. Hal ini secara lebih jelas ditegaskan lagi oleh Perdana Menteri Zao Ziyang ketika berkunjung ke Bangkok bulan Februari 1981. Dikatakannya bahwa dukungan Cina kepada partai-partai komunis di Asia Tenggara hanya terbatas pada dukungan "politis dan moral" dan Cina akan berusaha agar hubungannya dengan partai-partai itu tidak mengganggu kerjasama dan persahabatannya dengan negara-negara ASEAN. Jadi tampaknya pernyataan Zhao Ziyang itu mengungkapkan bahwa hubungannya dengan partai-partai komunis itu merupakan masalah prinsip yang akan tetap dipertahankan. Hanya karena kepentingan keamanan nasional dan kepentingan reformasinya Cina tidak menghendaki terjadinya konflik dengan negara-negara ASEAN, sehingga negara itu berusaha untuk tidak terlalu menekankan hubungan antar partai.

Dalam kunjungannya ke Thailand Zhao Ziyang juga menyatakan bahwa Cina tidak akan mengeksport revolusi dan samasekali menentang campurtangan dalam urusan dalam negeri negara-negara lain. Dengan membaiknya hubungan antar pemerintah itu, dukungan kepada gerilya-gerilya komunis semakin berkurang dan tampaknya Cina bersikap netral dalam soal pemberontakan

komunis di negara-negara ASEAN. Perkembangan ini sangat berpengaruh dan menguntungkan pihak pemerintah setempat. Pengalaman Thailand, misalnya, menunjukkan bahwa perbaikan hubungan dengan Cina penting artinya untuk menekan gerilya komunis Thailand. Hanya dua bulan setelah PM Zhao Ziyang berkunjung ke negara itu, pada bulan April 1981 Partai Komunis Thailand (CPT) memutuskan untuk berunding dengan pemerintah membahas masalah genecatan senjata.

Kejadian itu disusul dengan penyerahan secara besar-besaran anggota CPT pro-Beijing. Pada tanggal 1 Desember 1982 sekitar 250 gerilyawan dan 800 pendukungnya menyerah di Propinsi Mukdaharn, yang terkenal sebagai basis terkuat CPT. Tanggal 27 Desember 1982 gerilyawan komunis lainnya menyerah di Propinsi Tak, dan pada tanggal 22 Januari 1983 sekitar 550 gerilyawan menyerah di Propinsi Mukdaharn. Sementara itu penyerahan diri gerilyawan komunis pro-Beijing juga terjadi di Malaysia dan Filipina.

### **Perkembangan Hubungan Indonesia-Cina**

Sejarah mencatat bahwa sebelum di Cina terjadi Revolusi Kebudayaan, satu-satunya negara, yang sekarang ini tergabung dalam organisasi regional ASEAN, yang mempunyai hubungan diplomatik dan cukup akrab dengan Cina adalah Indonesia. Tetapi hubungan tersebut memburuk menjelang dan sesudah terjadinya G-30-S/PKI. Bahkan pada tahun 1967 secara sepihak Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Cina.

Bagi Indonesia masalah normalisasi hubungan diplomatik diselesaikan secara hati-

<sup>3</sup>Deng Xiaoping berkunjung ke Thailand, Malaysia dan Singapura pada bulan November 1978.

hati sekali, terutama karena sikap Cina mengenai hubungannya antar partai dengan PKI. Meskipun Zhao Ziyang telah menegaskan tentang sikapnya terhadap masalah gerilya komunis di negara-negara ASEAN, kenyataannya hingga hari jadi PKI tanggal 23 Mei 1981 Beijing masih terus menyampaikan ucapan-ucapan selamat kepada PKI lewat radio Suara Revolusioner yang dipancarkan dari wilayah Yunan di Cina. Baru sejak siaran radio tersebut dihentikan pada tanggal 30 Juni 1981 dukungan-dukungan kepada perjuangan PKI itu sudah tidak terdengar lagi.

Dihentikannya dukungan kepada PKI merupakan suatu indikasi bahwa Cina memang bersungguh-sungguh ingin menormalisasi hubungannya dengan Indonesia. Usaha tersebut sebenarnya telah dirintis sejak awal tahun 1970-an. Misalnya ketika Cina menandatangani Perjanjian Perdamaian Vietnam di Paris bulan Februari 1973, Menteri Luar Negeri Cina, Chi Peng-fei, telah mengadakan pembicaraan dengan Menlu Indonesia, waktu itu almarhum Adam Malik, mengenai usaha pencairan hubungan diplomatik kedua negara. Selain itu kontak-kontak pribadi juga pernah dilakukan antara pejabat-pejabat pemerintah kedua negara di PBB untuk tujuan yang sama.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, usaha Cina untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia itu semakin ditingkatkan setelah kelompok reformis di bawah pimpinan Deng Xiaoping semakin mendominasi kekuasaan baik di dalam partai maupun di pemerintahan. Secara eksplisit, misalnya, Perdana Menteri Li Hsien-nian pernah mengatakan pada awal tahun 1978 bahwa Cina telah siap mencairkan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Niatnya untuk memperbaiki hubungan itu juga diungkap-

kan dengan disahkannya suatu undang-undang baru mengenai "Kewarganegaraan Cina" pada bulan September 1980. Masalah kewarganegaraan ini sejak lama memang merupakan salah satu hambatan bagi hubungan kedua negara. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut, misalnya, disebutkan bahwa: "The People's Republic of China does not recognize dual nationality for any Chinese National." Dengan demikian Cina samasekali menghapus kewarganegaraan rangkap, sehingga bagi orang Cina Perantaraan yang telah menaturalisasikan dirinya di negara setempat secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Cina dan harus mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara setempat, tidak terlibat dalam setiap kegiatan politik dan hidup bersahabat dengan penduduk setempat.

Masalah kewarganegaraan ini sebenarnya bukanlah masalah baru. Masalahnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Pemerintah Indonesia segera berusaha mengatasi masalah kewarganegaraan. Pada bulan April 1946 Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang berlandaskan pada asas *ius soli*. Asas ini menyebutkan bahwa warganegara Indonesia terdiri dari orang asli yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan orang-orang bukan asli (asing), tetapi yang lahir di wilayah Indonesia dan telah tinggal di sana selama sekurang-kurangnya lima tahun secara berturut-turut, serta mereka yang telah berumur 21 tahun, dengan syarat orang-orang tersebut tidak menolak kewarganegaraan Indonesia karena menjadi warganegara negara lain. Akibat undang-undang itu, 1,5 juta warga Cina yang lahir di Indonesia seharusnya bisa menjadi warganegara Indonesia kecuali jika mereka meno-

laknya. Departemen Kehakiman Indonesia pada awal tahun 1950-an mengemukakan bahwa terdapat 390.000 warga Cina yang menolak kewarganegaraan Indonesia.<sup>4</sup>

Dengan diresmikannya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina pada tahun 1950, masalah kewarganegaraan ini menjadi sorotan tajam, terutama karena pihak Cina pada waktu itu berusaha memanfaatkan warga "huagiao" (Cina perantauan) yaitu warganegara Cina yang bertempat tinggal sementara di negara-negara lain, bagi kepentingan nasional Cina seperti penyebaran ideologi komunis. Karena hal ini membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia, maka pada tahun 1955 Indonesia dan Cina mengadakan perjanjian mengenai Dwi-Kewarganegaraan. Untuk pertama kali Cina mencabut pernyataan tradisionalnya, yaitu bahwa semua orang Cina adalah warganegara RRC.

Inti perjanjian Dwi-Kewarganegaraan itu menyatakan bahwa warga Cina yang tinggal di Indonesia wajib tunduk kepada undang-undang dan kebiasaan dari negara tempat tinggal dan tidak akan ikut serta dalam kegiatan politik di negara tempat mereka bertempat tinggal. Tetapi perjanjian ini dibatalkan oleh Indonesia pada tahun 1969 setelah ternyata Cina terlibat dalam usaha kudeta yang dilakukan oleh G-30-S/PKI tahun 1965 dan setelah hubungan diplomatik dibekukan tahun 1967. Sejak itu Pemerintah Indonesia mengatasi masalah kewarganegaraan dari warga Cina asing dengan naturalisasi

<sup>4</sup>Lihat Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China* (Singapura: Heinemann Asia, 1986), hal. 113-115, atau terjemahannya yang berjudul *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: PT Temprint, 1982), hal. 115-117.

<sup>5</sup>Lihat *Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 5 tahun 1958.

menurut Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1958. Sebagai contoh, menurut Bagian 4, Undang-undang tersebut, orang asing kelahiran Indonesia yang orangtuanya ber-diam dan lahir di Indonesia boleh mengajukan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia apabila mereka telah berumur 18 tahun. Sementara itu Bagian 5 Undang-undang itu mengatur bagi orang asing dewasa yang ingin menjadi warganegara Indonesia (WNI). Bagian itu menyatakan bahwa orang asing itu harus memenuhi persyaratan tempat tinggal, yaitu sekurang-kurangnya telah berdiam selama 5 tahun berturut-turut; persyaratan bahasa; mempunyai sumber penghasilan tetap dan diharuskan membayar kepada negara sebanyak Rp500-Rp10.000,00 atau suatu jumlah yang tidak lebih tinggi daripada penghasilan yang diperoleh selama satu bulan.<sup>6</sup>

Perubahan-perubahan sikap Cina dalam usahanya untuk menormalisasi hubungannya dengan Indonesia itu mulai mendapat tanggapan positif dari pihak Indonesia pada pertengahan 1980-an. Pada saat itu Indonesia mulai membuat terobosan baru dengan mengizinkan KADIN untuk menandatangani "Memorandum of Understanding (MOU)" dengan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) di Singapura tanggal 5 Juli 1985. Bahkan MOU tersebut kemudian didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya INPRES no. 9/1985 tanggal 23 Juli 1985 yang isinya mendukung secara resmi pembukaan kembali hubungan dagang langsung antara Indonesia dan Cina. Sementara itu penegasan yang selalu ditunggu-tunggu oleh pihak Indonesia akhirnya muncul juga

<sup>6</sup>Menurut Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1968 jumlah itu telah dinaikkan menjadi Rp30.000-Rp100.000.



Pernyataan penegasan itu untuk pertama kalinya terungkap ketika Wakil Perdana Menteri Cina, Wu Xueqian, bertemu "empat mata" dengan Ketua Kadin waktu itu, Sukamdani S. Gitosardjono, di Beijing tanggal 30 Juni 1988. Rupanya penegasan yang sekaligus merupakan jaminan itu diutarakan sebagai tanggapan terhadap sikap Indonesia yang telah dinyatakan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan MPR tanggal 1 Maret 1988. Wu mengatakan bahwa Cina sudah bertahun-tahun tidak mempunyai hubungan dengan PKI. Oleh karena itu tidak ada masalah mengenai sokongan kepada sisa-sisa kekuatan PKI.<sup>7</sup>

Pernyataan jaminan pihak Cina itu kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen, ketika bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, yang menyertai Presiden Soeharto ke Tokyo. Penegasan Menlu Cina itu tampaknya tidak karena inisiatifnya sendiri, melainkan merupakan penegasan Pemerintah Cina, karena dia memang pada waktu itu menjadi utusan resmi Cina untuk menghadiri upacara pemakaman Kaisar Hirohito. Jadi kesepakatan Tokyo seperti yang telah disebutkan di atas mengungkapkan bahwa pihak Indonesia sudah menerima penegasan atau jaminan pihak Cina sehubungan dengan masalah PKI.

### Dampak Normalisasi

Beberapa kalangan berpendapat bahwa normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina akan lebih banyak menguntungkan pihak Cina daripada Indonesia. Tetapi kalau diamati lebih teliti, mungkin saja normalisasi tersebut bermanfaat juga bagi Indonesia baik ditinjau dari segi politik,

keamanan regional maupun ekonomi.

Ditinjau dari segi politik dan keamanan regional, normalisasi hubungan diplomatik itu banyak manfaatnya. Sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak lagi bersikap "low profile." Sebagai negara yang menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif, sikap yang aktif dalam percaturan internasional sangat penting. Terlebih-lebih jika dipandang dari kacamata negara Dunia Ketiga. Tepatlah kiranya jika yang dijadikan dasar normalisasi hubungan itu adalah Dasa Sila Bandung yang juga merupakan dasar dari Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Sementara itu Cina yang merupakan negara besar di Asia dan sekaligus adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak bisa lagi diabaikan. Kedua negara ini bisa bekerjasama di banyak bidang untuk mengatasi berbagai masalah politik dan keamanan kawasan. Dalam masalah Kampuchea, misalnya, Cina memegang peranan kunci, karena tanpa melibatkan negara ini, masalah Kampuchea itu tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas.<sup>8</sup> Perlu diingat bahwa sikap keras Vietnam dalam masalah ini selalu saja dikaitkan oleh adanya apa yang disebut *ancaman Cina*. Dengan dicairkannya kembali hubungan diplomatik antara kedua negara itu, Indonesia akan lebih bisa banyak berperan, misalnya membantu menjembatani persengketaan antara Vietnam dan Cina.

Demikian pula halnya dalam konflik teritorial di Laut Cina Selatan. Sekarang ini Cina secara fisik militer telah hadir di ka-

<sup>8</sup>Lihat Juwono Sudarsono, "Krisis Indocina: Dimensi Regional dan Internasional," *Analisa*, No. 5, Mei 1988, hal. 298-299.

<sup>7</sup>*Suara Pembaruan*, 18 Februari 1989.

wasan itu dengan pendudukannya di beberapa gugus pulau di Kepulauan Spratly. Tampaknya motivasi Cina menduduki pulau-pulau itu bukan hanya karena kepentingan ekonomi, tetapi juga kepentingan strategi. Tampaknya Cina merasa sudah saatnya untuk mengimbangi kehadiran Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan itu. Sementara itu Cina juga mungkin ingin dirinya mulai diperhitungkan dalam percaturan regional. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan Cina setelah berhasil merebut beberapa pulau yang sebelumnya diklaim Vietnam itu. Untuk mencegah hal-hal yang hanya akan mengganggu kestabilan keamanan kawasan, kiranya sudah waktunya kalau Indonesia, Cina, Vietnam dan negara-negara lain yang berkepentingan di kawasan Laut Cina Selatan duduk di meja perundingan mencari jalan pemecahan sengketa itu.

Ditinjau dari segi ekonomi normalisasi hubungan diplomatik itu juga banyak manfaatnya. Meskipun selama ini Indonesia terus mengalami defisit perdagangan dengan Cina, volume perdagangan kedua negara, terutama setelah ditandatanganinya MOU, terus meningkat. Ekspor Indonesia pada tahun 1986 bernilai US\$56,7 juta meningkat menjadi US\$118,7 juta atau meningkat 101%. Sementara itu impor Indonesia pada tahun 1986 bernilai US\$232,9 juta meningkat menjadi US\$238,4 juta atau meningkat 4%.<sup>9</sup> Dari data tersebut di atas tampak bahwa ekspor Indonesia lebih cepat meningkatnya dibandingkan impornya. Hal ini berbeda dengan ketika Indonesia masih berdagang dengan Cina melalui negara ketiga (Hongkong). Dari tahun 1979 sampai 1981 misalnya, defisit perdagangan Indonesia dengan Cina bertambah besar. Pada tahun 1979 defisit tersebut adalah US\$120 juta,

1980 US\$159 juta dan tahun 1981 US\$230 juta.

Di sektor minyak Indonesia juga bisa mengadakan pembicaraan langsung dengan Cina, di saat harga patokan minyak OPEC belum mencapai US\$18 per barel. Rendahnya harga patokan minyak bumi itu disebabkan oleh produksi berlebihan dari negara-negara pengekspor minyak non OPEC termasuk Cina. Dalam hal ini Indonesia dan Cina bisa bekerjasama untuk mengatasi masalah keseragaman harga patokan minyak itu sehingga akan dicapai suatu kestabilan harga.

Terobosan baru Presiden Soeharto di Tokyo itu merupakan tindakan yang tepat, terutama dalam suasana hubungan internasional yang sudah berubah ini. Tampak pola hubungan internasional sekarang ini tidak lagi didasarkan pada kepentingan ideologi, melainkan pada kepentingan nasional. Karena kepentingan nasionalnya itu banyak negara semakin sadar akan semakin besarnya saling ketergantungan antar bangsa. Oleh karena itu tidak mengherankan bila telah terjadi pendekatan-pendekatan baru yang lebih bersifat penyesuaian. Hal ini terjadi tidak saja antara negara adidaya atau negara-negara besar, tetapi juga negara-negara di banyak kawasan yang sebelumnya dalam suasana berseteru.

Dalam hal hubungan dengan Cina, dampak negatif akan selalu dapat dicegah, apabila kita tetap waspada dan mengadakan persiapan sebaik-baiknya. Persiapan itu misalnya dengan: (1) melakukan pengawasan atas kehidupan organisasi sosial-politik, sehingga penyusupan dari kekuatan-kekuatan luar dapat dihindarkan; (2) membatasi jumlah diplomat Cina yang akan ditempatkan di Indonesia maupun membatasi ruang gerak

<sup>9</sup>Antara, 3 Maret 1989.



dan kegiatan mereka. Dalam hal pembukaan kantor Kedutaan, hendaknya Cina hanya diperkenankan membuka Kedutaannya di Jakarta dengan lokasi di luar "Kampung Cina" atau di luar wilayah Glodok; (3) menyelesaikan secara tuntas masalah kewarganegaraan Cina perantauan. Tampaknya dalam hal Cina Perantauan, Pemerintah Indonesia telah berusaha menuntaskan permasalahannya. Menurut Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman, data orang asing sejak 2 Januari sampai 2 Juli 1987 menunjukkan jumlah 350.000 orang, termasuk sekitar 100.000 orang Cina eks PP 10/1959. Untuk mengatasi masalah ini telah dikeluarkan Keputusan No. 05.01.06 tahun 1987 tertanggal 15 September 1987 oleh Menteri Kehakiman.<sup>10</sup> Keputusan itu bertujuan menertibkan status keberadaan orang Cina asing eks PP 10/1959 ditinjau dari aspek keimigrasian dan untuk menghindarkan dampak kerawanan terhadap keamanan dan ketertiban negara atas ketidakpastian hukum bagi orang asing. Masalah Cina Perantauan yang ada di Indonesia jelas merupakan masalah intern, karena pihak Cina sudah mempunyai undang-undang kewarganegaraan yang jelas. Warga Cina asing di Indonesia sudah diberi waktu selama satu tahun, yaitu hingga 15 September 1988, untuk mendaftar kembali. Setelah tanggal tersebut, mereka yang tidak mendaftar kembali akan diperlakukan sebagai warga yang tak berkewarganegaraan (stateless).

Data mengenai Cina Perantauan atau Cina Asing mengungkapkan bahwa dari sekitar lima atau enam juta warga keturunan Cina, hanya sekitar 100.000 orang Cina Perantauan atau Cina Asing. Jadi sebagian besar penduduk keturunan Cina adalah warganegara Indonesia seperti warga Indonesia lainnya yang harus mendapat perlakuan yang sama pula. Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika (karena daerah, suku, keturunan atau agama) dilakukan secara terus-menerus sehingga akan tercapai satu Ketahanan Nasional yang mantap, yang mampu menghadapi situasi regional dan internasional dengan penuh keyakinan. Mereka yang berasal dari keturunan Cina hendaknya juga dilibatkan secara aktif dalam pembangunan bangsa itu, sehingga mereka merasa sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sikap prasangka terhadap mereka hanya akan mendorong mereka menjadi eksklusif. Mereka yang sudah diakui mempunyai bakat dan keahlian di bidang bisnis itu justru harus diarahkan dan didorong untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan dan iklim semacam itu pada gilirannya turut membina perasaan memiliki dan tanggungjawab dari semua pihak akan kelangsungan kehidupan bangsa kita yang memang sangat majemuk ini.

<sup>10</sup>Antara, 4 Februari 1988.